

Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Dasar di SDN Siwalankerto 1 Surabaya

Koko Putra Hermawan ¹⁾, Nihayatus Sholichah ²⁾, Eny Haryati ³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: kokohermawan642@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di jenjang sekolah dasar, khususnya di SDN Siwalankerto 1 Surabaya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, konteks penelitian deskriptif kualitatif bersumber dari hasil wawancara secara langsung. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) Standar dan sasaran kebijakan, terlihat dari siswa yang putus sekolah belum sepenuhnya bisa melanjutkan sekolah dan jadwal penerimaan PIP tidak sesuai standar serta implementor kurang tepat sasaran; (b) Sumber daya, dilihat dari kurangnya sumber daya manusia yang ahli, sehingga harus ada pelatihan kembali untuk penugasannya; (c) Hubungan antar organisasi masih kurang dan tidak menyeluruh; (d) Sikap implementor yang harus diperhatikan tidak tersedianya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan program PIP; (e) Karakteristik agen pelaksana harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan standar yang belum sesuai yaitu kurang tepat sasaran; serta (f) Kondisi sosial, ekonomi dan politik terlihat dari kecemburuan sosial yang terjadi antar masyarakat. Saran yang diperlukan yaitu diadakannya sosialisasi yang menyeluruh dan intensif baik dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun SDN Siwalankerto 1 khususnya kepada wali murid. Petugas PIP dianjurkan dapat memberikan informasi dan komunikasi mengenai mekanisme penetapan sasaran PIP, serta diadakannya monitoring dari pendataan penerima dana PIP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Sekolah Dasar

Abstract

This research aims to describe the implementation of the Indonesia Pintar Program at the elementary school level, specifically at SDN Siwalankerto 1 Surabaya. The method used in this study is descriptive qualitative, with qualitative descriptive context sourced from direct interview results. Data collection techniques involve literature review and field studies, derived from observation, interviews, and documentation. Furthermore, data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory applied in this research is based on the theories of Meter and Van Horn. The research findings indicate that (a) Standards and policy objectives are reflected in the fact that students who drop out of school have not fully continued their education, and the timing of PIP acceptance does not meet standards, with implementers being less targeted; (b) Resources are inadequate due to a lack of qualified human resources, necessitating retraining for assignments; (c) Inter-organizational relationships are lacking and not comprehensive; (d) The attitude of implementers should be noted as there are insufficient facilities to support the implementation of the PIP program; (e) The characteristics of implementing agents must be considered by the Surabaya City Education Office, as standards are not met and are less targeted; and (f) Social, economic, and political conditions are reflected in the social jealousy that occurs among the community. Recommendations include the need for comprehensive and intensive socialization from both the Surabaya City Education Office and SDN Siwalankerto 1, particularly to parents. PIP officers are encouraged to provide information and communication regarding the mechanisms for determining PIP targets, as well as to conduct monitoring of the data collection for PIP fund recipients."

Keywords: Policy Implementation, Indonesia Pintar Program, Elementary School

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangatlah penting untuk mendorong kemajuan suatu negara, karena perannya yang signifikan untuk mencapai kemajuan di berbagai aspek kehidupan, seperti; ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Maka dari itu Pemerintah Indonesia memberikan hak asasi kepada setiap warga negara Indonesia, berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara sistem pendidikan nasional. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hingga saat ini dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 5 bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya adalah melalui Program Indonesia Pintar. Program ini diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemerintah telah meluncurkan program-program bantuan dalam pendidikan yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, adapun beberapa program bantuan pendidikan diantaranya seperti BOS, BSM, PSKS, PIP, dan PIS. Inpres tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), dan di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Pelaksanaan program wajib belajar masih ditemui kendala yaitu adanya peserta didik putus sekolah. Faktor penyebab peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah adalah peserta didik yang kondisi ekonomi keluarganya kurang mampu, sehingga orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak, yang terpaksa anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan ada pula keinginan anak itu sendiri tidak mau sekolah.

Menurut Fuad Benardi selaku Ketua DPC BMI Kota Surabaya bahwa 100 orang pelajar dari

warga yang kurang mampu di Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya menerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan sesuai tingkat pendidikan yaitu SD senilai Rp 450 Ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA/SMK Rp 1 juta. Beasiswa PIP berasal dari Jalur aspirasi berdasarkan pengajuan masyarakat.

Anggaran PIP dari Kemdikbud mengalami kenaikan di Tahun 2024 yaitu sebesar menjadi 9,7 T dengan jumlah penerima sebanyak 18,1 juta, lebih besar dari anggaran dana PIP Tahun 2023 yaitu 13,4 T dengan jumlah penerima sebanyak 18,6 juta siswa. Dana PIP untuk siswa SMA dan SMK mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar Rp 1 juta menjadi sebesar 1,8 juta. Dana PIP terbesar yang dikeluarkan dialokasikan pada jenjang Sekolah Dasar yang merupakan program wajib belajar dan pondasi dari Pendidikan, sehingga masyarakat Indonesia wajib untuk menyelesaikan Pendidikan di jenjang SD.

Terkait dengan implementasi program PIP, SDN Siwalankerto 1 Surabaya di kecamatan Wonocolo menjadi salah satu kecamatan dengan tingkat siswa yang menerima PIP cukup banyak, dengan jumlah siswa keseluruhan dari kelas 1-kelas 6 sebanyak 123 siswa. Adapun kebutuhan biaya akademik maupun non akademik sangat membutuhkan biaya yang cukup besar oleh karena itu KIP yang merupakan produk dari PIP sangat dibutuhkan siswa atau siswi untuk mengurangi beban dari orang tua. Adapun jumlah siswa yang menerima PIP di SDN Siwalankerto 1 Surabaya antara lain:

Tabel 1.1. Data Siswa Penerima PIP di SDN Siwalankerto 1 Surabaya

No	Nama	Jumlah
1	Kelas 1	8
2	Kelas 2	8
3	Kelas 3	7
4	Kelas 4	8
5	Kelas 5	3
6	Kelas 6	15
Total Siswa		49

Sumber: Diolah penulis (2024)

Tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa penerima kuota PIP di SDN Siwalankerto 1 Surabaya hanya mencapai 49 % dari total 123 siswa yaitu sebesar 49 siswa yang berhak mendapatkan PIP untuk meringankan beban biaya Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerimaan dana Program Indonesia Pintar, serta masih adanya siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak terdaftar sebagai penerimaan Kartu Indonesia Pintar. Seharusnya pemerintah meluncurkan program ini diperuntukan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu agar mereka mendapatkan kesetaraan pendidikan yang sama.

Permasalahan dalam program Indonesia pintar yaitu program Indonesia pintar ini belum berjalan dengan maksimal sebagaimana semestinya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran wali murid tentang peruntukan bantuan PIP, dalam pemberian bantuan ini tidak tepat sasaran, adanya penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar oleh penerima program ini. Dengan adanya masalah yang terjadi, pemerintah sulit untuk mengawasi karena penyaluran dana tersebut langsung ke orang tua siswa dan orang tua yang mengelola, sekolah tidak dapat mengetahui dana tersebut untuk apa saja. Pada saat orang tua belum bisa mengelola dana tersebut dengan baik, maka akan banyak penyalahgunaan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi bukan untuk kebutuhan pendidikan anak. Serta adanya kecemburuan bagi orang tua yang tidak menerima bantuan tersebut, karena mereka merasa berhak untuk mendapatkan bantuan.

Hal ini sejalan dengan observasi awal peneliti yang mengatakan:

"Masih ada permasalahan yang ada di sekolah ini seperti program Indonesia pintar ini tidak tepat sasaran dan kurangnya merata pembagian KIP karena banyak orang tua yang minta dibuatkan Kartu Indonesia Pintar padahal sekolah tidak tahu pembuatannya karena sekolah hanya

mendata saja dan sekolah sulit untuk mengetahui dana untuk apa saja karena dana langsung ke orang tua, orang tua tidak memberikan bukti dari bank ke sekolah dan sekolah pun susah untuk merekap ulang siswa”.

Pada realitanya peneliti menemukan bahwa implementasi PIP masih belum begitu baik, dikarenakan masih ditemukan beberapa siswa/siswi yang tergolong mampu menerima kebijakan ini, sehingga banyak dari siswa/siswi yang kurang mampu mengalami kesusahan dalam administrasi sekolah. Beberapa orang tua juga mengaku kurangnya informasi dari pemerintah soal kebijakan PIP ini, pendataan yang masih perlu untuk ditingkatkan. Pendataan yang kurang baik sehingga menyebabkan pengimplementasian PIP di sekolah-sekolah yang ada di kota Surabaya terutama pada jenjang sekolah dasar dimana tidak validnya data kependudukan kembali terbukti pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan Pemerintah Pusat di kota Surabaya. Kartu yang seharusnya diperuntukkan kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan biaya sekolah justru didapatkan oleh orang yang tidak berhak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perlu diteliti dalam pelaksanaannya dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Dasar di SDN Siwalankerto 1 Surabaya”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

- a) Kebijakan publik sebagai tujuan, pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
- b) Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal, pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan

pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

- c) Kebijakan publik sebagai hipotesis, kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dari pemaparan diatas dikatakan bahwa, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Patton dan Sawicki dalam (Tangkilisan, 2003:9) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Menurut Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Van Meter dan Van Horn dalam (Solichin, 2007:146) membatasi

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam struktur kebijakan publik. Karena pada proses ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah diterapkan. Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan implementasi (pelaksana). Karena betapa baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.

Penekanan aktivitas birokrasi pemerintahan pada proses tersebut lebih pada tahapan implementasi, dengan cara menginterpretasikan kebijakan menjadi program, proyek, dan aktivitas. Dengan demikian, program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yaitu:

- a) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b) Adanya kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut
- c) Adanya aturan yang harus dipegang dan prosedur yang dilalui
- d) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e) Adanya strategi dalam pelaksanaan

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Fadillah Putra, 2003:84) mengatakan bahwa implementasi adalah untuk mengkaji masalah kebijakan yang berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha administrasinya maupun yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses administratif, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berlangsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan berpengaruh pada tujuan kebijakan baik yang negatif maupun positif.

3. Model Implementasi Kebijakan

Dari pengertian implementasi diatas, terdapat beberapa model implementasi yang dikemukakan beberapa ahli, antara lain:

a) Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn

Model ini disebut *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Argumen yang diberikan merupakan suatu perbedaan dalam proses pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan. Pendekatan ini berusaha menggabungkan antara implementasi dengan isu kebijakan dan suatu model konseptual yang memperhatikan kebijakan dengan prestasi kerja. Kepatuhan, kontrol dan perubahan bertindak adalah merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari orang-orang yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi (Suaib, 2016).

Van Horn berpendapat bahwa ada enam variabel yang dapat mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses implementasi kebijakan, diantaranya yaitu adanya standar dan sasaran kebijakan, adanya sumber daya yang memadai, komunikasi hubungan antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana atau implementor, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

b) Model Implementasi Menurut Mazmanian Sabatier

Mengungkapkan bahwa ada tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

c) Model Implementasi George Edward III

Berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Widodo 2010:98).

4. Program Indonesia Pintar

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang melekat kepada setiap kehidupan bersama atau dalam bahasa politik disebut sebagai “Negara Bangsa”, dalam rangka menjadikan kehidupan bersama tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan kehidupan. Tujuan pendidikan disesuaikan dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Setiap dimensi kehidupan (pembangunan) memiliki tujuan masing-masing dan semua

dimensi itu motor penggeraknya adalah manusia yang memilih, menentukan, melaksanakan pilihannya guna untuk mencapai tujuan hidup, baik tujuan manusia secara umum maupun tujuan hidup manusia secara spesifik.

Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan berbagai program agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar selanjutnya disebut (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan. Seperti yang tertuang pada Permendikbud 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, dana PIP dapat digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku hingga untuk uji kompetensi.

Tujuan PIP adalah untuk memberikan bantuan kepada peserta didik kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikannya. Dari tujuan tersebut, PIP dilaksanakan berdasarkan prinsip yang sudah ditentukan, seperti:

- a) Efisien yaitu menggunakan dana yang ada untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dalam waktu yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Efektif yaitu dana yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran.
- c) Transparan yaitu adanya keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai PIP.
- d) Akuntabel yaitu segala pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Kepatutan yaitu kegiatan dapat dilaksanakan dengan realistis dan proporsional.

- f) Manfaat yaitu pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan dengan sejalan sesuai prioritas nasional.

5. Sasaran dan Dana Program Indonesia Pintar

Agar dana bantuan PIP dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan, Pemerintah menetapkan beberapa kriteria untuk peserta didik yang bisa mendapatkan bantuan PIP yaitu anak sekolah usia 6 hingga 21 tahun, peserta didik merupakan pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar), peserta didik berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan, peserta didik dari keluarga Kartu Keluarga Sejahtera, peserta didik merupakan anak yatim piatu atau yatim atau piatu atau panti asuhan, peserta didik terkena dampak bencana alam, peserta didik tidak bersekolah karena tidak memiliki biaya, peserta didik memiliki kelainan fisik, korban musibah, orangtua terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Peserta didik yang mendapatkan bantuan PIP akan diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ia tempuh. Berikut besaran dana yang diterima peserta didik seperti yang dikutip dari situs Kemendikbud sebagai berikut:

- a) Peserta didik SD/MI/Paket A akan mendapatkan bantuan PIP sebesar Rp 450 ribu per tahun.
- b) Peserta didik SMP/MTS/Paket B akan mendapatkan bantuan PIP sebesar Rp 750 ribu per tahun.
- c) Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 juta per tahun.

Dana yang diberikan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, baik untuk membeli perlengkapan belajar hingga uang saku peserta didik. Untuk dapat mengklaim bantuan PIP tersebut, ada sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan oleh peserta didik, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM), rapor sekolah, surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar, antara lain:

- a) Peserta didik dapat melakukan pendaftaran di lembaga pendidikan terdekat dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- b) Jika tidak memiliki KKS, orangtua dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RT/RW dan kelurahan.
- c) Sekolah akan mendaftarkan peserta dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan kota setempat.
- d) Sementara untuk sekolah yang berada di naungan Kemendikbud diharuskan untuk memasukkan data peserta didik di aplikasi dapodik.
- e) Jika peserta didik lolos pendaftaran, maka pengambilan dana PIP dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif. Pengambilan kolektif untuk pelajar yang tinggal di wilayah yang sulit mengakses bank.

Untuk mendukung pendidikan di Indonesia, Pemerintah juga memberikan bantuan kepada sekolah melalui program dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program tersebut ditujukan agar satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan belajar mengajar.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu statistik yang lingkungannya berupa mengumpulkan, membentuk, menata serta mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat. Menurut Moleong (2012:6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Konteks penelitian deskriptif kualitatif bersumber dari hasil wawancara tidak terstruktur dengan informan, dimana seorang peneliti dituntut untuk aktif berinteraksi secara pribadi sesuai intuisinya memutuskan bagaimana merumuskan pernyataan dan melakukan pengamatan. Informan diberi kesempatan mengemukakan gagasan, persepsi, serta kesempatan untuk ikut serta dalam menganalisa data.

2. Fokus Penelitian

Dalam kepentingan pembahasan ini, maka fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar di Jenjang Sekolah Dasar di SDN I Siwalankerto Surabaya, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Program Indonesia Pintar di Jenjang Sekolah Dasar di SDN I Siwalankerto Surabaya. Pada fokus tersebut akan diteliti menggunakan teori Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014:141).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Siwalankerto 1 Surabaya, yakni beralamat di Jalan Ahmad Yani no. 247 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Lokasi penelitian ini dipilih karena Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya merupakan daerah padat penduduknya, juga peneliti ingin meneliti terkait judul diatas tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar pada SDN 1 Siwalankerto Surabaya

Hasil penelitian ini mendapatkan data-data valid dan reliabel untuk digunakan sebagai bahan atau informasi dalam menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Data-data yang didapatkan dari lapangan lebih banyak merupakan data atau informasi berupa hasil wawancara dengan informan penelitian yang kemudian peneliti analisa dan peneliti deskripsikan.

Implementasi merupakan kegiatan untuk melaksanakan sebuah kebijakan umum dan program sebelumnya telah direncanakan. Implementasi juga merupakan serangkaian kegiatan untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan yang sebelumnya telah disetujui yang dilaksanakan dengan strategi tertentu untuk dapat mencapai suatu tujuan.

Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:141) diantaranya yaitu:

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Merupakan suatu indikator yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan suatu program. Pemahaman tentang apa yang dijadikan sebagai standar serta sasaran kebijakan merupakan landasan dan tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan, implementor harus dapat memahami agar dapat mencapai hal-hal yang sebelumnya sudah direncanakan.

Dalam pembahasan ini, standar dari keberhasilan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang PIP peneliti pertanyaan kepada informan yang mengatakan bahwa tujuan dari Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang PIP sebagaimana dalam wawancara yang dikatakan oleh I bahwa:

“Sasaran dari kebijakan ini adalah para keluarga miskin atau kurang mampu dalam hal perekonomian guna memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, selain itu dalam hal ini PIP ada jadwal pencairan untuk siswa agar bisa mendapat bantuan PIP untuk membiayai kebutuhan sekolah dan dapat melanjutkan sekolah, namun jumlah penerima PIP tidak sesuai dengan jumlah pengajuan PIP.”

Dari ungkapan diatas dapat diketahui bahwa sasaran melalui program PIP di SDN Siwalankerto 1 Surabaya, adalah para siswa yang memiliki kartu Indonesia pintar dan siswa yang kondisi perekonomiannya kurang mampu. Dengan harapan dapat membantu siswa yang kurang mampu sehingga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Penentuan akhir pemberian sasaran dalam pemberian PIP adalah pihak Kementerian atau dinas daerah, yang datanya diambil dari data pokok pendidikan (Dapodik). Pihak sekolah akan mendata siapa saja yang berkesempatan untuk mendapatkan program indonesia pintar ini, kemudian data tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk memilih siswa yang layak untuk mendapatkannya.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator yang menjadi elemen kunci keberhasilan pada pelaksanaan suatu kebijakan. Sumberdaya dalam pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) di SDN 1 Siwalankerto Surabaya, dalam hal ini baik dari sumber manusia yang ada maupun sumber finansial yang telah menunjang. Dalam hal ini SDM yang berperan diantaranya yaitu, kepala sekolah, petugas PIP, beserta dewan guru di SDN Siwalankerto 1 Surabaya.

Respon informan mengenai pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan PIP dinilai cukup baik. Dapat dilihat pada pernyataan informan mayoritas respon informan menjawab setuju pada pernyataan petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 1 Siwalankerto Surabaya sudah cukup baik. Bahwasanya pada pelaksanaan PIP petugas yang bertugas dan terlibat sudah cukup sehingga dalam pelaksanaan program PIP ini sudah terselenggarakan dengan baik. Sedangkan informan yang menjawab tidak setuju dikarenakan dalam penyelenggaraan program PIP ini kurang adanya kerjasama tim.

Pernyataan informan mengenai pihak sekolah membimbing mendapatkan penilaian baik. Diperoleh data hasil wawancara adalah mayoritas respon informan menjawab setuju pada pernyataan pihak sekolah membimbing penerima dana pada saat pencairan dana PIP. Bahwasanya penerima dana merasa sudah dibimbing dari awal pembuatan rekening sampai pencairan dana langsung sekolah ikut andil dan membimbing penerima dana sampai dana benar dipegang langsung tunai oleh penerima dana PIP.

Dalam mengenai ketepatan pelayanan diperoleh data hasil tersebut mayoritas respon informan menjawab setuju pada pernyataan pihak sekolah sudah memiliki ketepatan yang baik dalam pelayanan bahwasanya pihak sekolah pada pelaksanaan sudah mengarahkan dan memantau berjalannya pelaksanaan dari program PIP ini sehingga penerima dana merasa terbantu pada proses program ini.

c) Hubungan antar Organisasi

Organisasi pelaksana kebijakan di dalamnya terdiri dari keterlibatan organisasi nonformal atau formal, karakteristik yang tepat dan sesuai para pelaksana dapat menentukan kinerja dari

suatu implementasi. Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) di SDN 1 Siwalankerto Surabaya, dalam hal ini hubungan antar petugas yang sangat mempengaruhi ketertiban guna menunjang kelancaran dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN 1 Siwalankerto Surabaya.

Terdapat dua gambaran atau hasil wawancara informan mengenai indikator hubungan antar organisasi yang diperlukan pada pelaksanaan dari Program PIP sebagai berikut:

Pertama yaitu stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi Program Indonesia Pintar. Pernyataan informan yang membahas mengenai sosialisasi pada sekolah diperoleh data hasil wawancara mayoritas responden menjawab setuju pada pernyataan sosialisasi pada sekolah bahwasanya yang telah dilakukan sudah cukup baik sehingga penerima manfaat merasa bisa lebih faham dan terbantu.

Sedangkan pernyataan informan yang membahas monitoring dari Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan bahwa monitoring dari Pemerintah tidak turun langsung ke lapangan dan jarang terlihat di area pelaksanaan dari program PIP dan turun saat ada kendala tertentu.

Pernyataan informan yang membahas tentang mengecek penurunan dana diperoleh data penelitian mayoritas responden menjawab tidak setuju pada pernyataan pengecekan penurunan dana PIP. Hal ini dikarenakan tidak ada pengecekan langsung dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada penerima dana tanpa mengetahui jumlah yang diterima dan waktu penerimaan sehingga pengecekan yang dilakukan lemah.

Berdasarkan hasil wawancara informan bahwa mayoritas informan setuju dengan pernyataan bahwa

informasi yang diterima cepat dan tepat bahwasanya dengan adanya operator sekolah informasi yang diterima oleh penerima dana sangat mudah dan cepat sehingga membantu pihak sekolah untuk memberikan informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) kepada penerima manfaat dana PIP dan penerima manfaat juga bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dari pihak sekolah sebagai salah satu persyaratan dari PIP.

Selanjutnya terkait pernyataan informan yang membahas tentang arahan langsung dari Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Surabaya diperoleh data hasil wawancara adalah mayoritas setuju atas pernyataan arahan dari Pemerintah memberi arahan langsung meskipun melalui pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke sekolah lalu diberitahu lagi kepada penerima manfaat dana PIP. Selanjutnya ada beberapa responden menjawab tidak setuju, hal ini dikarenakan ada beberapa responden memang jarang sekali untuk mengikuti kumpulan pada saat ada sosialisasi sehingga tidak mengetahui arahan dan hanya mengandalkan informasi dari orang tua teman siswa sehingga kurang efektif juga informasi yang didapatkan kurang jelas.

Kedua yaitu koordinasi yang terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Pernyataan informan yang membahas tentang informasi yang cepat dan tepat, dengan hasil wawancara mayoritas respon informan setuju untuk pernyataan operator yang telah tersedia membuat komunikasi lebih efisien bahwasanya ini sangat memudahkan dan menghemat waktu sehingga komunikasi tentang pelaksanaan Program PIP bisa lebih cepat, tepat dan mudah sehingga memberi kelancaran pada pelaksanaannya juga adanya transparansi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke pihak sekolah.

d) Karakteristik Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) di SDN 1 Siwalankerto Surabaya dalam hal ini, karakteristik agen pelaksana sangat berpengaruh dalam kelancaran dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN 1 Siwalankerto Surabaya. Di bawah ini merupakan gambaran respon informan mengenai indikator karakteristik agen pelaksana yang diperlukan pada pelaksanaan dari Program PIP sebagai berikut: Struktur agen pelaksana, respon informan yang membahas tentang pembagian kerja yang jelas pada petugas PIP di SDN 1 Siwalankerto Surabaya menunjukkan bahwa mayoritas menyetujui atas Pembagian kerja yang jelas pada pelaksana PIP di SDN 1 Siwalankerto Surabaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Program PIP ini sehingga informan menjawab dengan baik. Dan beberapa informan menjawab tidak setuju karena Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak menyeluruh dalam memonitoring dan melaksanakan tugasnya yaitu ke setiap sekolah.

e) Disposisi Implementor

Sikap implementor (disposisi) dalam pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) di SDN 1 Siwalankerto Surabaya dalam hal ini sikap implementor sangat berpengaruh dalam kelancaran dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN 1 Siwalankerto Surabaya.

Terdapat dua gambaran respon informan mengenai indikator sikap implementor (disposisi) yang diperlukan pada pelaksanaan dari Program PIP sebagai berikut:

Pertama yaitu respons implementor terhadap kebijakan, pernyataan informan yang membahas tentang pelayanan yang baik dengan

memperoleh data hasil wawancara mayoritas. Respon informan menyetujui untuk pernyataan pelayanan yang baik yang diberikan petugas. Bahwasanya pelayanan yang diberikan oleh petugas di SDN 1 Siwalankerto Surabaya yang diberikan sudah baik kepada penerima dana.

Kedua yaitu pernyataan yang membahas tentang respon pemerintah rata-rata informan menyetujui pada pernyataan respon pemerintah mengenai program PIP diterima dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa respon pemerintah menerima dengan sangat baik terhadap Program Indonesia Pintar sehingga informan merasa pemerintah dalam hal ini sudah baik.

f) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Variabel terakhir dalam implementasi kebijakan yaitu lingkungan eksternal yang perlu dipertimbangkan sejauh mana hal itu dapat memberikan dorongan bagi kebijakan publik untuk mewujudkan tujuannya. Hal ini juga mencakup lingkungan sosial, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan mendukung dalam implementasi kebijakan, lingkungan ekonomi yang mendukung, karakteristik partisipan yang juga bersifat mendukung.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) di SDN 1 Siwalankerto Surabaya dalam hal ini sangat berpengaruh dalam kelancaran dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN 1 Siwalankerto Surabaya.

Berdasarkan aspek keadaan sosial, keadaan sosial mempengaruhi respon informan terkait dengan keadaan lingkungan yang mayoritasnya menyetujui pada pernyataan keadaan lingkungan sosial mendukung. Dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Wonocolo, masih banyak siswa tergolong miskin yang harus

dibantu biaya pendidikan maka dari itu adanya PIP dipengaruhi juga dengan keadaan sekitar.

Sedangkan respon informan yang membahas tentang kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat dengan adanya kecemburuan sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam pelaksanaan Program PIP. Hal ini dikarenakan hampir semua masyarakat ingin mendapatkan dari program PIP ini, tidak hanya yang kurang mampu saja tetapi yang terbilang mampu pun juga ingin mendapat bantuan PIP.

Hasil respon informan menunjukkan bahwa mayoritas informan menjawab setuju pada pernyataan pelaksanaan Program PIP saat ini mempengaruhi keadaan sosial. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi mendukung karena sebagian besar mata pencaharian penduduk sebagai petani dan buruh, sehingga dalam pembiayaan sangat harus dibantu dan PIP ini salah satu acuan yang menjadi dasar pendidikan yang harus ditarik agar dalam pembiayaan pendidikan di Kecamatan Wonocolo tidak putus sekolah dan bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Selanjutnya pernyataan informan yang membahas tentang pembiayaan pendidikan mendorong PIP menunjukkan bahwa mayoritas informan menjawab setuju pada pernyataan pelaksanaan Program PIP mempengaruhi keadaan ekonomi saat ini. Bahwasanya keadaan ekonomi mempengaruhi pelaksanaannya PIP, karena di Kota Surabaya ini khususnya Kecamatan Wonocolo rendahnya pendidikan sehingga sangat bagus dan mendukung dilaksanakannya program ini. Beberapa informan menjawab tidak setuju hal ini dikarenakan bahwa adanya bantuan PIP ini hanya membuat orang untuk malas mencari biaya pendidikan karena telah disediakan oleh pemerintah.

2. Faktor Pendukung Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar pada SDN 1 Siwalankerto Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor pendukungnya terlihat dari sumber daya peralatan yang memadai seperti gedung dan komputer. Sarana pendukung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN Siwalankerto 1 Surabaya ini terlihat dari adanya fasilitas gedung dan laptop yang digunakan pada saat pertemuan. Selain itu juga faktor penunjang lainnya, terlihat dari adanya buku panduan yang diberikan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan PIP agar dapat memudahkan dalam pemberian informasi.

Faktor pendukung lainnya terlihat dari adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan program Indonesia pintar ini yang merupakan suatu kesadaran yang perlu dilakukan demi tercapainya keinginan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kebijakan.

3. Faktor Penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar pada SDN 1 Siwalankerto Surabaya

Faktor penghambat merupakan faktor yang perlu diperbaiki demi mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai untuk kedepannya. Adapun faktor penghambat dalam penelitian implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Siwalankerto 1 Surabaya diantaranya permasalahan yang terkadang pihak sekolah kurang adil karena semua siswa diusulkan tanpa adanya syarat khusus bagi penerima bantuan. Sementara itu di sekolah ini masih ada banyak siswa yang kurang mampu, dan tidak masuk daftar penerimaan Program Indonesia Pintar.

Faktor penghambat adanya masalah ini, terkait dengan karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang harus mereka ulang dan menindak tegas bagi bagi sekolah yang merekomendasikan siswa atau

siswi yang tergolong mampu dari pada yang kurang mampu. Dengan hal itu dapat menciptakan kecemburuan antar anak maupun orang tua.

Selain itu juga dalam pemberian bantuan ini, faktor penghambat lainnya terlihat dari adanya penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh penerima program ini. Dengan adanya masalah yang terjadi, pemerintah sulit untuk mengawasi karena penyaluran dana tersebut langsung diberikan ke orang tua siswa dan orang tua yang mengelola, sekolah tidak dapat mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa saja. Pada sejatinya bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi keperluan anak sekolah.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini, terlihat dari peneliti masih menemukan beberapa pernyataan dalam indikator Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) di SDN 1 Siwalankerto Surabaya dipaparkan sebagai berikut:

- a) Standar dan sasaran kebijakan dapat diperhatikan siswa yang putus sekolah belum sepenuhnya akan melanjutkan sekolah, karena masih banyak terlihat siswa yang masih tidak lanjut sekolah. Jadwal penerima dana PIP tidak sesuai dengan standar yang berlaku, bahwasanya pada dua kali dalam dua semester tetapi satu kali dalam dua semester. Implementor kurang tepat sasaran pada program PIP ini karena masih banyak siswa kategori miskin yang belum dapat manfaat PIP.
- b) Sumber daya dapat dilihat kurangnya sumber daya manusia yang ahli sehingga harus ada pelatihan kembali untuk penugasannya. Petugas yang terlibat belum sepenuhnya terlibat karena masih banyak petugas yang tidak bekerja.

- c) Hubungan antar organisasi dimana sosialisasi pada sekolah masih kurang dan tidak menyeluruh. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Surabaya kurang menyeluruh sehingga tidak termonitoring seluruh sekolah. Pemerintah Dinas Pendidikan Surabaya kurang mengecek penurunan dana pada saat pencairan pada penerima sudah diterima langsung.
- d) Sikap implementor (disposisi) yang harus diperhatikan tidak tersedianya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan Program PIP. Tidak tersedianya tempat pengaduan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat pada program PIP ini.
- e) Karakteristik agen pelaksana harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya karena tidak menyeluruh dalam memonitoring dan melaksanakan tugasnya yaitu ke setiap sekolah. Serta standar pelaksanaan yang belum sesuai yaitu kurang tepatnya sasaran.
- f) Kondisi sosial, politik dan ekonomi dapat diperhatikan pada lingkungan sosial yang mempengaruhi program PIP yaitu kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat. Karena dari masyarakat sendiri banyak yang ingin mendapatkan bantuan dana PIP, dari kategori mampu maupun tidak mampu. Pembagiannya kurang menyeluruh pendataan sehingga siswa yang tergolong tidak mampu tidak mendapatkan bantuan dari dana PIP.
- b) Petugas PIP harus menyebarluaskan informasi dan komunikasi mengenai mekanisme penetapan sasaran PIP berbasis rumah tangga. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga orang tua siswa yang belum mendapatkan dana PIP bisa mendapatkan manfaat dari program tersebut.
- c) Diadakannya pelatihan atau pembelajaran untuk petugas dari pihak SDN 1 Siwalankerto Surabaya agar petugas lebih siap dan tanggap dalam pelaksanaan PIP untuk memberikan pelayanan yang baik, tepat, dan efisien.
- d) Selanjutnya, perlu diadakannya monitoring dari pendataan siswa penerima dana PIP sampai pencairan dana oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sampai ke sekolah agar terevaluasi dengan menyeluruh.

REFERENSI

- Abdul, W. S. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Budi, W. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Putra, F. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 1 Siwalankerto Surabaya antara lain sebagai berikut:

- a) Perlu diadakannya sosialisasi yang menyeluruh dan intensif yang diadakan baik dari Dinas pendidikan Kota Surabaya maupun dari SDN 1 Siwalankerto Surabaya kepada orang tua

siswa penerima dana agar memahami tujuan dari program PIP.

- Setyawati, S. (2018). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi Siswa Smk di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar). *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpullis.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, & Nyoman. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, & Solichin, A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Wahab, & Solichin, A. (2008). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

